

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH SEMESTA BERENCANA
TAHUN 2026

Rencana Kerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Klungkung Tahun 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan di Tingkat perangkat daerah yang memuat program kegiatan yang dibutuhkan dalam mewujudkan sasaran pembangunan dan dibuat setiap tahun. Penyusunan Renja dilaksanakan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan penyusunan Renja PD sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi enam tahapan yaitu a) persiapan penyusunan; b) penyusunan rancangan awal; c) penyusunan rancangan, d) pelaksanaan forum perangkat daerah, e) perumusan rancangan akhir; dan f) penetapan.

Renja Perangkat Daerah disusun berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan majunya. Untuk tahun 2026, merupakan perencanaan tahun kedua dari pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029. Selanjutnya berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah harus mempertimbangkan hasil evaluasi yang memuat identifikasi permasalahan, isu strategis dan rekomendasi tindak lanjut untuk memecahkan masalah.

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Renja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan Renstra Perangkat Daerah ke dalam rencana tahunan dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, dan program kegiatan prioritas Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati setelah ditetapkannya RKPD dengan Peraturan Bupati. Penetapan ini menjadikan Renja Perangkat Daerah memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan pedoman bagi penyusunan dokumen penganggaran

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2022 tentang cipta karya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106};
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung tahun 2025 - 2045;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;
18. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Klungkung nomor 48 tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomer 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
19. Peraturan Bupati Klungkung nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung tahun 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun 2026 adalah untuk :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2026
- b. Menyediakan tolak ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun 2026.

Sedangkan Tujuan penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun 2026 adalah :

- a. Untuk merumuskan program, dan kegiatan dan target kinerjanya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung selama tahun 2026 dan sejalan dengan target dan prioritas daerah.
- b. Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.
- c. Untuk menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan Pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar belakang
- b. Landasan hukum
- c. Maksud dan tujuan
- d. Sistematika Penulisan

2. BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- a. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- b. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- c. Isi-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- d. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- e. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat

3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PEROGAM DAN KEGIATAN

- a. Telaahan Kebijakan Nasional dan Provinsi Tujuan dan sasaran renja
- b. Tujuan dan Sasaran Renja
- c. Program dan Kegiatan
- d. Indikator Kinerja Utama

4. BAB IV PENUTUP

5. Lampiran-lampiran

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung 2024-2026

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun 2024 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2025 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Adapun rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung dalam Tabel T.C.29 berikut ini.

Tabel 2.1 (Tabel T.C.29)

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024 DAN PENCAPAIAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

Kode					Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)					Target Kinerja &AnggaranRenja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		RealisasiCapaian Kinerja dan AnggaranRenja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja &AnggaranR enja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja &AnggaranRenstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Unit SKPD Penang gung Jawab
																	IV								
															K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2					3					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																				
4	2				SEKRETARIAT DPRD																				
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi	21	34.364.659.882,00	28,38	32.059.320.550,00	28,38	32.059.320.550,00	135,14	93,29	28,38	32.059.320.550,00									
4	2	1	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PErangkat Daerah	85	1.044.780.468,00	77,36	952.755.144,00	77,36	952.755.144,00	91,01	91,19	77,36	952.755.144,00	Kabag Keuangan								
4	2	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TersusunnyaDoumen Peerencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	8	85.421.468,00	8	83.457.868,00	8	83.457.868,00	100	97,7	8	83.457.868,00	Kabag Keuangan								

4	2	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31	959.359.000,00	31	869.297.276,00	31	869.297.276,00	100	90,61	31	869.297.276,00	Kabag Keuangan
4	2	1	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan terkirim tepat waktu	4	3.292.652.302,00	4	3.207.407.542,00	4	3.207.407.542,00	100	97,41	4	3.207.407.542,00	
4	2	1	2	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya kebutuhan Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	13	3.285.574.952,00	13	3.200.497.542,00	13	3.200.497.542,00	100	97,41	13	3.200.497.542,00	Kabag Keuangan
4	2	1	2	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/semesteran terkirim tepat waktu	13	7.077.350,00	13	6.910.000,00	13	6.910.000,00	100	97,64	13	6.910.000,00	Kabag Keuangan
4	2	1	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur	100	980.270.814,00	97,59	910.862.864,00	97,59	910.862.864,00	97,59	92,92	97,59	910.862.864,00	
4	2	1	2	05	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pemenuhan layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100	980.270.814,00	100	910.862.864,00	100	910.862.864,00	100	92,92	100	910.862.864,00	Kabag Umum dan Kepegawaian
4	2	1	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan administrasi Umum	100	4.030.538.008,00	82,22	3.035.499.679,00	82,22	3.035.499.679,00	82,22	75,31	82,22	3.035.499.679,00	
4	2	1	2	06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	95	3.914.169.958,00	95,38	2.956.099.899,00	95,38	2.956.099.899,00	100,4	75,52	95,38	2.956.099.899,00	Kabag Umum dan Kepegawaian

4	2	1	2	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Surat yang diarsipkan sesuai dengan Klasifikasi	100	116.368.050,00	98,54	79.399.780,00	98,54	79.399.780,00	98,54	68,23	98,54	79.399.780,00	Kabag Umum dan Kepegawaian
4	2	1	2	1	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	100	24.823.165.272,00	98,63	23.798.163.153,00	98,63	23.798.163.153,00	98,63	95,87	98,63	23.798.163.153,00	
4	2	1	2	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	terpenuhinya gaji dan tunjangan DPRD	13	24.061.167.260,00	13	23.289.033.174,00	13	23.289.033.174,00	100	96,79	13	23.289.033.174,00	Kabag Keuangan
4	2	1	2	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD tersedia tepat waktu	30	666.498.012,00	30	413.748.012,00	30	413.748.012,00	100	62,08	30	413.748.012,00	Kabag Umum dan Kepegawaian
4	2	1	2	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Dokumen hasil pemeriksaan kesehatan	30	95.500.000,00	30	95.381.967,00	30	95.381.967,00	100	99,88	30	95.381.967,00	Kabag Umum dan Kepegawaian
4	2	1	2	1	Layanan Administrasi DPRD	Persentase terpenuhinya Layanan Rapat DPRD	100	193.253.018,00	100	154.632.168,00	100	154.632.168,00	100	80,02	100	154.632.168,00	
4	2	1	2	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat	94	193.253.018,00	94	154.632.168,00	94	154.632.168,00	100	80,02	94	154.632.168,00	Kabag Hukum dan Perundang-Undangan

Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													94,9 1	88,7 9			
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													ST	T			
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupanpemenuhanl ayananpelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100	23.279.450.067,00	100	16.556.256.099,00	100	16.556.256.099,00	100	71,12	100	16.556.256.099,00	
4	2	2	2	01	PembentukanPeraturan Daerah dan Peraturan DPRD	PersentaseRancanga nPerda yang dibahas	100	1.092.260.726,00	76,47	884.136.305,00	76,47	884.136.305,00	76,47	80,95	76,47	884.136.305,00	
4	2	2	2	01	PembahasanRancanganPer aturan Daerah	PersentasePembaha sanRancanganPeratu ran Daerah Inisiatif DPRD	100	1.092.260.726,00	67	884.136.305,00	67	884.136.305,00	67	80,95	67	884.136.305,00	Kabag Hukum dan Perund ang - Undang an
4	2	2	2	03	PengawasanPenyelenggara anPemerintahan	Persentasehasilpeng awasanpemerintaha n yang ditindaklanjuti	100	5.453.376.900,00	100	4.816.704.808,00	100	4.816.704.808,00	100	88,33	100	4.816.704.808,00	
4	2	2	2	03	PengawasanPenggunaanAn ggaran	Laporan Hasil Pengawasan DPRD	18	5.453.376.900,00	24	4.816.704.808,00	24	4.816.704.808,00	133,33	88,33	24	4.816.704.808,00	Kabag Umum dan Kepega waian
4	2	2	2	04	PeningkatanKapasitas DPRD	PersentasePemenuh anKebutuhanPening katanKapasitas DPRD	100	15.625.888.999,00	95,83	9.927.204.294,00	95,83	9.927.204.294,00	95,83	63,53	95,83	9.927.204.294,00	
4	2	2	2	04	Orientasi DPRD	LaporanPelaksanaan Orientasi DPRD	36	14.255.752.431,00	33	8.918.817.071,00	33	8.918.817.071,00	91,67	62,56	33	8.918.817.071,00	Kabag Umum dan

																	Kepega waian
4	2	2	2	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	jUMLAH Kegiatan yang dipublikasikan	33	1.370.136.568,00	33	1.008.387.223,00	33	1.008.387.223,00	100	73,6	33	1.008.387.223,00	Kabag Umum dan Kepega waian
4	2	2	2		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti	100	1.107.923.442,00	100	928.210.692,00	100	928.210.692,00	100	83,78	100	928.210.692,00	
4	2	2	2	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Reses	3	1.107.923.442,00	3	928.210.692,00	3	928.210.692,00	100	83,78	3	928.210.692,00	Kabag Umum dan Kepega waian
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)													93,08	79,15			
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan													ST	T			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI BIDANG								57.644.109.949,00		48.615.576.649,00		48.615.576.649,00				48.615.576.649,00	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program Bidang Urusan (%)													117,57	82,21			
Predikat Kinerja Program Bidang Urusan													ST	T			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH								57.644.109.949,00		48.615.576.649,00		48.615.576.649,00				48.615.576.649,00	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)													117,57	82,21			
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program													ST	T			

Berdasarkan tabel 2.1 (T.C.29) di atas dapat dijelaskan bahwa dari 2 Program Semua memenuhi target kinerja Renja pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan yang tidak memenuhi Target kinerja hasil/kluaran yang direncanakan yaitu

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.935.636.456.00 terealisasi sebesar Rp 649.969.643,00 (69,47%).

- Publikasi dan Dokumentasi Dewan dengan anggaran sebesar Rp. 1.705.305.376,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.276.748.624,00 (74,87%). Indikator sub kegiatan Jumlah dokumen publikasi dan dokumentasi DPRD dengan target 33 dan realisasi 33 (100 %)

b). Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan aspirasi masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 797.710.484,00 dan terealisasi sebesar Rp. 644.768.285,00 (80,83 %) dengan indikator kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses dengan target 3 dan realisasi 2 (66,67 %)

Kegiatan tersebut di dukung oleh Sub Kegiatan.

- Reses dengan anggaran Rp. 797.710.484,00 dan terealisasi sebesar Rp.644.768.285,00 (80,83 %) dengan indikator sub kegiatan jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses dengan target 3 dan realisasi 2 (66,67 %)

Adapun pada sub kegiatan reses ini untuk capaian kinerja dibawah 80% karena pada target dipasang kegiatan reses 3 kali sedangkan untuk tahun 2024 yang merupakan akhir masa jabatan Anggota DPRD hanya boleh melaksanakan 2 kali reses.

b. Kegiatan yang memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan :

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.989.424.866,00 terealisasi sebesar Rp.3.862.888.208,00 (96,83 %) dengan indikator kegiatan Laporan Keuangan terkirim tepat waktu target sebesar 4,00 dan terealisasi 4,00 capaian 100%

b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 924.868.808,00 terealisasi sebesar Rp. 863.054.589,00 (93,32) dengan indikator Cakupan pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian dengan target 100 dan realisasi 96, 97 (96,97%) Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.375.020.776,- terealisasi sebesar Rp. 1.927.918.408,00 (85,49) dengan indikator kegiatan cakupan pemenuhan layanan administrasi umum dengan target 100 dan realisasi 100

d. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 25.397.142.543,00 terealisasi sebesar Rp.24.464.084.093,00 (96,33%) dengan indikator kegiatan terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD dengan target 100 dan realisasi 93,75 (93,75%)

- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 709.159.689,00 terealisasi sebesar Rp.321.943.674,00 (45,40) dengan indikator kegiatan cakupan pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah dengan target 100 dan realisasi 100 (100 %)
- f. Layanan Administrasi DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 551.211.066,00 terealisasi sebesar Rp.318.252.579,00 (57,74%) dengan indikator terpenuhinya layanan Rapat DPRD dengan target 100 dan realisasi 98,85 (98,85%)
 - i. Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD dengan anggaran sebesar Rp 551.211.066,00 dengan realisasi sebesar Rp.318.252.579,00 (57,74%)
- g. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan Anggaran sebesar Rp. 1.355.806.772,00 terealisasi sebesar Rp.887.911.638,00 (65,49%) dengan indikator kegiatan Persentase rancangan perda yang dibahas dengan target 100 dan realisasi 100 (100%).
- h. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Anggaran sebesar Rp.7.126.242.480,00 dan terealisasi Rp.4.568.400.800,00 (65,49%) dengan indikator persentase hasil pengawasan pemerintah daerah yang ditindaklanjuti dengan target 100 dan realisasi 100 (100 %)
- i. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan Anggaran sebesar Rp.22.705.225.676,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.463.046.772,00 (54,89%) dengan indikator kegiatan Persentase Fasilitas Kegiatan peningkatan Kapasitas dengan target 100 dan relaisasi 100 (100 %).

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk meningkatkan capaian kinerja program tersebut yaitu :

- a. Peningkatan pengendalian kebijakan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- b. Peningkatan fasilitas dan koordinasi penyusunan, pengendalian dan evaluasi hasil perencanaan perangkat daerah;
- c. Peningkatan kompetensi SDM perencana melalui peningkatan frekuensi pelaksanaan orientasi, workshop dan bimtek perencanaan dan perluasan sarannya mencakup seluruh pejabat eselon III dan IV.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

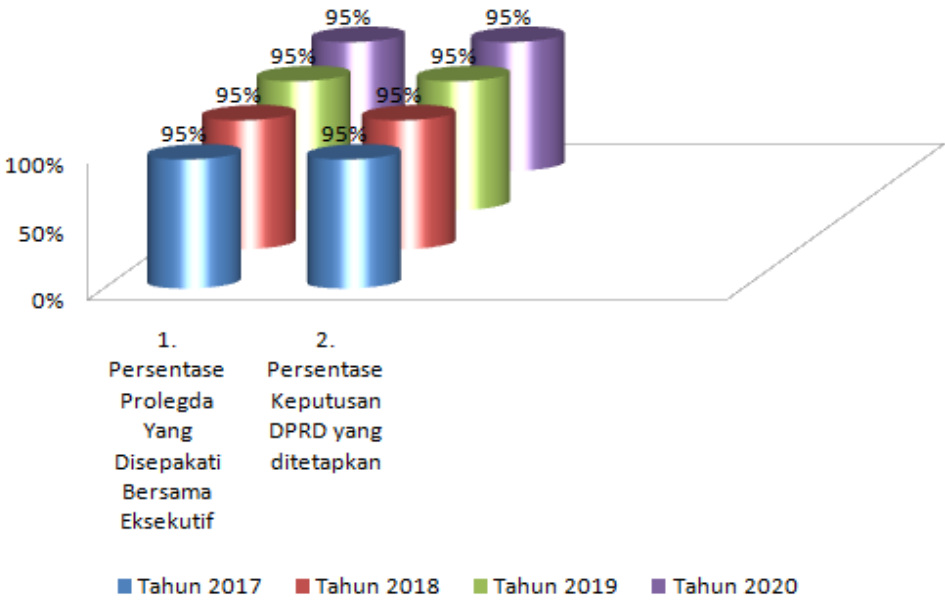
Kajian Terhadap Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung dilakukan Berdasarkan Indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Klungkung yang tertuang dalam RPD Kabupaten Klungkung 2024-2026 dan Renstra Kabupaten Klungkung Tahun 2024/2026

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/St andar Nasiona l	IKK /IK U	Target Renstra			Proyeksi				Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase Prolegda Yang Disepakati Bersama Eksekutif			95%	95%	95%		95%	95%	95%	
2	Persentase Keputusan DPRD yang ditetapkan			100%	100%	100%		100%	100%	100%	

Grafik Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah



Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mempunyai tugas pokok "Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. "Untuk menjalankan tugas tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan sekretariat dewan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Merumuskan sasaran program fasilitasi rapat, risalah, hukum, penyerapan aspirasi, umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Merumuskan kebijakan operasional Sekretaris Dewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Membagi tugas kepada kepala bagian agar tugas-tugas terbagi habis dan berjalan lancar;
- e. Memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis;
- g. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
- h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- i. Menginventarisasi permasalahan Sekretariat Dewan serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. Mengevaluasi hasil kegiatan secara keseluruhan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- l. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur Pelayanan dan fasilitasi kedewanan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitasi DPRD dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasi kedewanan sangat bergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (*bottom-up*) maupun dari tingkat atas (*top-down*), sehingga peran serta masyarakat (*stakeholders*) sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari

tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kab. Klungkung tahun 2026, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.3.1 Identifikasi Permasalahan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD mempunyai fungsi penyelenggaraan kesekretariatan DPRD. Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung menghadapi berbagai permasalahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD yang telah dirumuskan.

- a. Adanya penempatan Sumberdaya manusia yang belum sesuai kebutuhan.
- b. Tingkat kedisiplinan pegawai yang masih kurang
- c. Masih kurangnya jumlah SDM yang kompeten di bidangnya.

Permasalahan-permasalahan tersebut, jika tidak diatasi akan memberikan dampak tidak tercapainya tujuan dan sasaran RPJMD sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yaitu terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik dengan tujuan terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, responsif, santun dan inovatif dan target SDG's pada tujuan mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat dengan indikator kinerja Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 71 persen.

Berdasarkan uraian analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Klungkung maka terdapat beberapa hal yang perlu dicermati yaitu :

- a. Pentingnya pengelolaan data kinerja sebagai satu kesatuan sistem informasi manajemen perencanaan pembangunan daerah.
- b. Pentingnya membangun budaya kinerja melalui penanaman paradigma orientasi kinerja sehingga perencanaan didasarkan pada target kinerja yang jelas dan fokus mendukung target capaian kinerja pembangunan daerah.
- c. Sinergitas program kegiatan pusat-provinsi dan daerah. Tuntutan agar perencanaan pembangunan daerah selaras dengan perencanaan pembangunan provinsi dan pusat terus menguat sebagai implementasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2.3.2 Tantangan dan Peluang Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dan kemungkinan akan dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

- a. meningkatnya tuntutan akan penyelenggaraan pembangunan yang efektif, tepat sasaran dan tuntas. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena ketersediaan dan pemanfaatan data dalam perencanaan belum optimal disamping belum terimplementasinya pendekatan perencanaan substantif (tematik-holistik, integratif dan spasial). Perubahan *mindset stakeholder* perencanaan yang selama ini menyusun perencanaan lebih bersifat kegiatan rutinitas setiap tahun menjadi berbasiskan target kinerja yang jelas masih perlu upaya yang kuat dan berkelanjutan.
- b. Menguatnya tuntutan konsistensi perencanaan dan penganggaran yang selama ini cenderung diabaikan. Kedepan tidak boleh lagi ada kegiatan yang tidak direncanakan tetapi dianggarkan. Hal ini adalah salah satu aksi prioritas dalam Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Korupsi Terintegrasi.
- c. Dinamika peraturan perundangan yang menuntut adaptasi yang cepat.
- d. Tingginya tuntutan dalam hal fungsi Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi DPRD Kabupaten Klungkung

Sedangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. kuatnya *political will* pimpinan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas pemerintah daerah baik melalui implementasi SAKIP dan *roadmap* Reformasi Birokrasi serta penerapan *reward and punishment* bagi aparatur yang diukur berdasarkan perencanaan dan realisasi kinerja perangkat daerah.
- b. Komitmen pemerintah pusat untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan dalam mendukung percepatan pembangunan;
- c. Perkembangan revolusi industri 4.0 yang mendorong pemanfaatan kemajuan teknologi informasi guna mewujudkan kemudahan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

2.3.3 Isu-Isu Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Berdasarkan pemetaan masalah dan akar masalah maka isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kab. Klungkung adalah:

- a. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.
Perencanaan adalah prinsip pertama diantara prinsip-prinsip manajemen. Semua teori-teori perencanaan pembangunan meletakkan perencanaan sebagai hal yang pertama dilakukan,

termasuk dalam teori administrasi publik yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan yang berkualitas akan memberikan jaminan proses pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih mudah karena pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan memiliki pentahapan yang jelas. Perencanaan pembangunan daerah tidak saja focus pada penyusunan dokumen perencanaan semata tetapi lebih luas dimulai dari pengelolaan data kinerja, pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah menuntut adanya perubahan budaya birokrasi dari budaya “kerja” menjadi budaya “kinerja” yang berarti birokrasi tidak lagi hanya puas pada keberhasilan melaksanakan kegiatan tetapi keberhasilan birokrasi diukur dari tercapainya target hasil dan manfaat pelaksanaan kegiatan tersebut.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2026, Sekretariat DPRD Kab. Klungkung merancang program dan kegiatan yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2026. Terhadap rancangan awal RKPD tersebut kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil analisis kebutuhan untuk memastikan kesesuaian program dan kegiatan yang dirancang dalam Rancangan Renja Tahun 2026 dengan Rancangan RKPD Tahun 2026. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung

NoReK											Hasil Analisis Kebutuhan				
					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
1					2	3	4	5		7	8	9	10		11
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH				74.067.164.467,00					74.067.164.467,00	
4	02				SEKRETARIAT DPRD				74.067.164.467,00	SEKRETARIAT DPRD				74.067.164.467,00	
4	02	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD		39.178.823.967,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD		39.178.823.967,00	
	02	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	70 Poin	891.887.500,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	70 Poin	891.887.500,00	
	02	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dearah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	8 Dokumen	39.307.500,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dearah	Persentase hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti	Sekretariat DPRD	8 Dokumen	39.307.500,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dearah: Atk,Belanja Jasa Kantor dan Materai
	02	1	02.01	5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	Sekretariat DPRD	31 Laporan	852.580.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	Sekretariat DPRD	31 Laporan	852.580.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :Belanja ATK,Belanja Cetak dan Belanja Perjalanan Dinas dalam raka ASDEKSI dan Konsultasi/koordinasi dan Menghadiri Undangan Undangan
4	02	01	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan dan aset tersusun tepat waktu	Sekretariat DPRD	100 Persen	9.505.181.368,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan dan aset tersusun tepat waktu	Sekretariat DPRD	100 persen	9.505.181.368,00	

	02	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	30 orang/bulan	9.489.942.568,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	30 orang/bulan	9.489.942.568,00	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Dan Pembayaran gaji dan tunjangan ASN
	02	01	02.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan keuangan, Bulanan/Semesteran Terkirim Tepat Waktu	Sekretariat DPRD	13 Laporan	15.238.800,00	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan keuangan, Bulanan/Semesteran Terkirim Tepat Waktu	Sekretariat DPRD	13 Laporan	15.238.800,00	Belanja ATK dan Jasa Tenaga Pengurus Barang 1 Tahun
4	02	04	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks IPASN Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	81,67	62.525.304,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks IPASN Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	81,67	62.525.304,00	
	02	04	2.05	3	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sekretariat DPRD	12 dokumen	62.525.304,00	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sekretariat DPRD	81,67	62.525.304,00	Belanja ATK , Perangko dan Tenaga Adminstras selama 1 tahun
4	02	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	74,10	1.674.098.400,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	74,10	1.674.098.400,00	
	02	1	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Sekretariat DPRD	3 paket	1.355.241.600,00	PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Sekretariat DPRD	3 paket	1.355.241.600,00	Pemenuhankebutuhan sarana dan prasaranakantor Belanja Modal Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (home Use)
					Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Sekretariat DPRD	12 laporan	141.360.400,00	FasilitasiKunjungantamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Sekretariat DPRD	12 laporan	141.370.000,00	BelanjaMakanan dan Minumantamu
	02	1	02.06	10	PenatausahaanArsipDinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	Sekretariat DPRD	12 Dokumen	177.496.400	PenatausahaanArsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Sekretariat DPRD	12 Dokumen	177.507.300,00	Belanja Atk Cetak dan Benda Pos
					Penyediaan Jasa PenunjangUrusanPemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemeintah daerah	Sekretariat DPrD	100 %	633.901.216,00	Penyediaan Jasa PenunjangUrusanPe merintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemeintah daerah	Sekretariat DPrD	100 %	633.901.216,00	Belanjatagihanlistrik air telp
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Jumlah laporan peyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Sekretariat DPRD	12 laporan	331.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Jumlah laporan peyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Sekretariat DPRD	12 laporan	331.000.000,00	Belanjatagihanlistrik air telepon
					Penyediaan Jasa Pealayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	Sekretariat DPRD	2 Laporan	302.901.216,00	Penyediaan Jasa Pealayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	Sekretariat DPRD	2 Laporan	302.901.216,00	

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	Sekretariat DPRD	100%	1.015.932.280,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	Sekretariat DPRD	100%	1.015.932.280,00	
					Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipeihar dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Sekretariat DPRD	35 Unit	601.304.478,00	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihar dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Sekretariat DPRD	35 unit	601.304.478,00	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Sekretariat DPRD	179 unit	89.080.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Sekretariat DPRD	179 Unit	89.080.000,00	
					Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Sekretariat DPRD	3 Unit	325.547.802,00	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Sekretariat DPRD	3 Unit	325.547.802,00	
	02	1	02.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terpenuhinya layanan keuanagn dan kesejahtraan Pimpinan dan anggota DPRD (%)	Sekretariat DPRD	100 %	24.835.087.899,00	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terpenuhinya layanan keuanagn dan kesejahtraan Pimpinan dan anggota DPRD (%)	Sekretariat DPRD	100 %	24.835.087.899,00	
	02	02	2.01	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terpenuhinya gaji dan tunjangan DPRD (Bulan)	Sekretariat DPRD	13 Bulan	24.496.087.899,00	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terpenuhinya gaji dan tunjangan DPRD (Bulan)	Sekretariat DPRD	13 Bulan	24.496.087.899,00	Pembayaran Gaji dan Tunjangan DPRD
	02	02	2.01	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Tersedia Tepat Waktu (stel)	Sekretariat DPRD	30 Stel	189.000.000,00	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Tersedia Tepat Waktu (stel)	Sekretariat DPRD	30 Stel	189.000.000,00	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
	02	02	2.02	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Dokumen Hasil Pemeriksaan Kesehatan (Dokumen)	Sekretariat DPRD	30 Dokumen	150.000.000,00	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Dokumen Hasil Pemeriksaan Kesehatan (Dokumen)	Sekretariat DPRD	30 Dokumen	150.000.000,00	Pembiayaan Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD
4	02	02	02.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Terpenuhinya Layanan Rapat DPRD (%)	Sekretariat DPRD	100 %	560.210.000,00	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Terpenuhinya Layanan Rapat DPRD (%)	Sekretariat DPRD	100 %	560.210.000,00	
	02	02	02.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat (Laporan)	Sekretariat DPRD	87 Laporan	560.210.000.00	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Pelaksanaan nRapat (Laporan)	Sekretariat DPRD	87 Laporan	560.210.000,00	Biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
4	02	02			Program Pendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Layanan Kedinasan DPRD	Sekretariat DPRD	100 Persen	34.888.340.500,00	Program Pendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Layanan Kedinasan DPRD	Sekretariat DPRD	100%	34.888.340.500,00	
	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Rancangan Perda yang Dibahas (%)	Sekretariat DPRD	100 %	1.621.907.100,00	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Rancangan Perda yang Dibahas (%)	Sekretariat DPRD	100%	1.621.907.100,00	

4	02	03	2.01	02	PembahasanRancanganPeraturan Daerah	PersentasePembahasanRancanganPeraturan Daerah Inisiatif DPRD (%)	Sekretariat DPRD	100 %	1.621.907.100,00	PembahasanRancanganPeraturan Daerah	PersentasePembahasanRancanganPeraturan Daerah Inisiatif DPRD (%)	Sekretariat DPRD	100%	1.621.907.100,00	Jasa Tenaga Administrasi Jasa Tenga Ahli Belanja Perjalanan Dinas Keluar daerah konsultasi/koordinasidan menghadiri Undangan-undangan
4	02	03	2.03		PengawasanPenyelenggaraanPemerintahan	Persentase hasil pengawasan pemerintah yang ditindaklanjuti	Sekretariat DPRD	100 %	5.598.614.100,00	PengawasanPenyelenggaraanPemerintahan	Persentase hasil pengawasan pemerintah yang ditindaklanjuti	Sekretariat DPRD	100%	5.598.614.100,00	
4	02	03	2.03	07	PengawasanPenggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	Sekretariat DPRD	18 dokumen	5.598.614.100,00	PengawasanPenggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	Sekretariat DPRD	18 dokumen	5.598.614.100,00	Belanja ATK,Belnaja Perjalanan Dians Biasa
4	02	03	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitas Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Sekretariat DPRD	100%	26,266.581.100,00	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitas Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Sekretariat DPRD	100%	26,266.581.100,00	
4	02	03	1.04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Hsil penyelenggaraan orientasi DPRD	Sekretariat DPRD	36 Laporan	22.016.880.000	Orientasi DPRD	Jumlah Hsil penyelenggaraan orientasi DPRD	Sekretariat DPRD	36 Laporan	22.016.880.000	Bbiaya Perjalanan Dinas Biasa dalam1 Tahun, Belanja ATK, Perangko
					Pendalaman Tugas	Jumlah Dokumen hasil pendalaman tugas	Sekertariat DPRD	6 laporan	2.604.960.000,00	Pendalaman tugas	Jumlah Dokumen hasil pendalaman tugas	Sekretariat DPRD	6	2.604.960.000,00	BiayaPerjalanandinas ,atkperangko
4	02	03	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumen DPRD	Sekretariat DPRD	33 Kegiatan	1.644.741.100,00	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumen DPRD	Sekretariat DPRD	33 Kegiatan	1.644.741.100,00	Belanja ATK, Perangko, Belanja Tenaga Administrasi dan Belanja Cetak
4	02	03	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase serapan aspirasi masyarakat	Sekretariat DPRD	100%	1.401.238.200,00	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase serapan aspirasi masyarakat	Sekretariat DPRD	100%	1.401.238.200,00	
4	02	03	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Persentase tersusunnya Laporan Hasil Reses DPRD	Sekretariat DPRD	3 Laporan	1.401.238.200,00	Pelaksanaan Reses	Persentase tersusunnya Laporan Hasil Reses DPRD	Sekretariat DPRD	3 Laporan	1.401.238.200,00	Belanja Makan dan Minum Rapat, Perjalanan Kenusa Penida, TeangaDaministrasi Dan Sewa Gedung Rapat

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses bottom-up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi Usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memadukan perencanaan bottom up dengan perencanaan yang bersifat top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membina konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang tingkat Kelurahan/Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum SKPD serta Musrenbang Tingkat Kota/Kabupaten. Pada Tahap Forum SKPD, Usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD terkait. Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil Musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan Musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun Renja SKPD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam meningkatkan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan Nasional, Provinsi maupun Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD.

TABEL.2.5

Usulan Program Dan Kegiatan Dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Klungkung

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kabupaten klungkung

	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	

III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN, dan PP No.17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selain itu, PP No. 17 Tahun 2017 juga mengamanatkan pendekatan penganggaran berbasis program (moneyfollows program) yang mengoptimalisasi alokasi pendanaan untuk mendanai program-program prioritas. Arah kebijakan pembangunan dalam RKP 2024 difokuskan pada (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energy, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta (8) pelaksanaan Pemilu 2024.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 ditargetkan 5,3-5,7 persen. Selain tantangan global, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi dibayangi juga oleh tantangan domestik. Unsur-unsur penting penggerak ekonomi, yakni investasi, ekspor, industri manufaktur, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami perlambatan dalam tiga tahun terakhir. Sasaran pertumbuhan ekonomi pada 2026 bergantung pada realisasi pertumbuhan pada 2025. Saat ini, perekonomian Indonesia ditargetkan tumbuh 5,0-5,3% persen pada 2025

Prioritas pembangunan ini diarahkan sejalan dengan Rencana Kerja Pembangunan Nasional tahun 2026, yang terkait dengan program peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja. Sesuai dengan tema RKP tahun 2026, yakni “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025 sesuai dengan RPJMN adalah:

1. Tingkat kemiskinan pada kisaran 6,5 – 7,5 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,7 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 73,99-74,02;
4. Gini rasio pada kisaran 0,375-0,377;
5. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5-5,7persen.
6. Penurunan emisi gas rumah kaca 27,27 persen;
7. Nilai tukar petani 105-108;
8. Nilai tukar nelayan 107-110.

Mengingat tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung sebagai unit penunjang dan pelayanan administratif maka tidak salah juga menjadikan Rencana Strategis dari Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung sebagai bahan untuk mensinergikan dalam optimalisasi pelayanan administrasi dalam rangka tugas – tugas pokok dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni Legislasi, Budgeting dan Pengawasan.

Adapun hubunganprioritasnasional, prioritasProvinsi Bali dan prioritas Kabupaten Klungkung adalahsebagaimanadijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

Hubungan Prioritas Nasional, Provinsi Bali dan Prioritas Kabupaten Klungkung Tahun 2026
cyang terkait dengan Tugas dan DPRD Kabupaten Klungkung

Level	Nasional	Provinsi Bali	Kabupaten Klungkung
Prioritas	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Percepatan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif.
Program Prioritas	Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi		Program Peningkatanakuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik
Kegiatan Prioritas	Pelaksanaan e-Government yang Terintegrasi		PenguatanPerencanaanberbasiskinerja
Rincian Kegiatan	Penerapanaplikasi e- <i>planning, e-budgeting, e-procurement, e-monev, e performance</i> yang terintegrasipusat dan daerah		Pengembangan Sirenbangda yang terintegrasi dengan SIMDA Keu, e-SAKIP, e-Kinerja

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi den menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang.Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun 2026 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut :“Terwujudnya Pelayanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kab.Klungkung”

Tabel 3.2.1.1

Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RPD yang terkait Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Sasaran	Tujuan Jangka Menengah SKPD
Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan	✓ Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemeritahan

Tabel 3.2.1.2

Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Target	Kondisi Akhir
				2026	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	• Indeks Reformasi Birokrasi	85 %	91,4 %	85 %

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah: **Terwujudnya pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kab. Klungkung**

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung secara lebih ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.2.2.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Klungkung

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
				Tahun Ke-2026
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Terwujudnya pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kab. Klungkung	• Indeks Reformasi Birokrasi	75 Indeks
			• Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD	80%

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung mendefenisikan seluruh Sasaran Strategis, kebijakan, program, dan kegiatan yang diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolak ukur (*benchmarks*) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dalam upaya perumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan adalah : 1. Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berdasarkan tugas dan fungsinya Bappeda mendukung pencapaian tujuan yang hendak dicapai, maka Bappeda dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terutama mendukung pencapaian tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator kinerja indeks Reformasi Birokrasi.

4.2. Program dan Kegiatan

Berdasarkan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan serta berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026 maka dirancang 2 program 12 Kegiatan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 74.067.164.467,00,-.

Fokus masing-masing program dan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1.** Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran meningkatnya tata kelola perangkat daerah memiliki fokus kegiatan meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset, meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum, terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dan terpeliharanya barang milik daerah
- 2.** Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan sasaran Persentase Pelayanan Kedinasan memiliki fokus kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peningkatan Kapasitas DPRD dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat.

4.3. Rumusan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD Dalam pelaksanaan RKPD, tidak terdapat kegiatan dan subkegiatan yang tidak tercantum dalam rancangan awal RKPD.

4.4. Tabel rencana program dan kegiatan Tabel rencana program dan kegiatan disajikan dalam Tabel T-C.33 berikut ini.

Tabel 3.7 (Tabel T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SEKRETARIAT DPRD				74.067.164.467,00				74.989.364.508,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				74.067.164.467,00				74.989.364.508,00
4.02	SEKRETARIAT DPRD				74.067.164.467,00				74.989.364.508,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75	39.178.823.967,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		75	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Poin	891.887.500,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	70 Poin	891.974.192,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	39.307.500,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	8 Dokumen	58.407.192,00

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31 Laporan	852.580.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	31 Laporan	837.567.000,00
--	-----------------------------------	---	---	------------	----------------	--	---	------------	----------------

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Laporan keuangan dan asset tersusun tepat waktu</i>		100 persen	9.505.181.368,00		-	100 persen	9.505.235.468,00
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang/bulan	9.489.942.568,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PAJAK DAERAH	-	30 Orang/bulan	9.489.942.568,00
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	15.238.800,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4 Laporan	15.292.900,00
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Indeks IP ASN Perangkat Daerah</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81,67	62.525.304,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		81,67	62.525.304,00
5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 dokumen	62.525.304,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		12 dokumen	62.525.304,00
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Nilai Audit Kearsipan Internal perangkat Daerah</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74,10 poin	1.674.098.400,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		74,10	1.674.118.900,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 paket	1.355.241.600,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3 paket	1.355.241.600,00
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	141.360.400,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		12 Laporan	141.370.000,00
4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	177.496.400,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	12 Dokumen	177.507.300,00
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	633.901.216,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	100 persen	609445.408,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua kel/desa	12 laporan	331.000.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	12 laporan	331.034.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	302.901.216,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		2 Laporan	302.901.216,00
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1.015.932.280,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	100 persen	1.050.378.648,00
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 unit	601.304.478,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	35 unit	634.749.168,00
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	-	179 Unit	89.080.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	179 Unit	89.630.822,00
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 unit	325.547.802,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3 unit	325.998.658,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	<i>Cakupan layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	24.835.087.899	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		100 Persen	24.9688.762.277
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	<i>Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang/Bulan	24.496.087.899,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		30 Orang/Bulan	24.496.087.899,00
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	189.000.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		4 Paket	322.674.378,00
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	150.000.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		30 Orang	150.000.000,00560

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	<i>Persentase Layanan Administrasi DPRD</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	560.210.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		100 Persen	564.784.000,00
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87 Laporan	560.210.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		87 Laporan	564.784.000,00
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	<i>Persentase Pelayanan Kedinasan DPRD</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	34.888.340.500,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		100 persen	35.125.846.602,00
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	<i>Persentase Rancangan Perda yang dibahas</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	1.621.907.100,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		100 persen	1.618.163.414,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	1.621.907.100,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		8 Dokumen	1.618.163.414,00
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	<i>Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100	5.598.614.100,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		100	5.598.614.100,00
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	<i>Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100	26.266.581.100,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		100	26.086.148.020,00
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Dokumen	22.016.880.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		36 Dokumen	21.714.950.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	2.604.960.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		6 Dokumen	2.737.981.000,00
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	<i>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33 Dokumen	1.644.741.100,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		33 Dokumen	1.633.217.020,00
4.02.02.2.05	Pelaksanaan Reses	<i>Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	1.401.238.200,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		3 Dokumen	1.311.535.168,00
J U M L A H					74.067.164.467,00				74.989.364.508,00

4.5. Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Tahun 2026 Berdasarkan sasaran dan target kinerja di atas, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Tahun 2026 yang merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.5 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja IKU Bappeda Tahun 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2026
1	Terwujudnya pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kab. Klungkung	Terwujudnya pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kab. Klungkung	80%

BAB V

PENUTUP

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2026 ini dapat disusun. Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya. Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung yg berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD. Demikian Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung selama kurun waktu 2026 ini, diharapkan menjadi pedoman lebih lanjut bagi seluruh unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung

BUPATI KLUNGKUNG,

I MADE SATRIA